

# CURRICULUM VITAE

**Matheus Nathanael, S.H., C.L.D.**

Email: [siagian.matheus@ijrs.or.id](mailto:siagian.matheus@ijrs.or.id)

Linkedin: [M.N. Siagian](#)



## PROFIL SINGKAT

Matheus Nathanael, S.H., C.L.D. adalah peneliti dan konsultan perancangan peraturan perundang-undangan, khususnya di bidang hukum pidana dan sistem peradilan pidana. Selain sebagai peneliti yang rutin terlibat dalam penelitian hukum dan sosial, Matheus juga tergabung dalam berbagai kelompok kerja (*working group*) penyusunan peraturan kebijakan dan legislasi di Kementerian/Lembaga Negara, seperti Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian PPN/Bappenas, serta Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan.

## JABATAN

Manajer Program untuk Divisi *Criminal Justice Reform* (CJR).

## PENDIDIKAN

1. SMP Kolese Kanisius Jakarta (2012);
2. SMA Kolese Kanisius Jakarta (2015);
3. S1 Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Indonesia (2020).

## PELATIHAN/SERTIFIKASI

1. Perancang Peraturan Perundang-Undangan Bersertifikat (*Certified Legislative Drafter/C.L.D*) dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi – Lembaga Sertifikasi Profesi Hukum Indonesia [No. Reg. HKM. 1945 00462 2024].

## PENGALAMAN KERJA (PENELITI)

1. Manajer Program untuk Reformasi Sistem Peradilan Pidana di IJRS [berdasarkan SK No. 16/SK-Direktur/IJRS/VII/2024] (12 Juli 2024 - sekarang);

2. Peneliti IJRS (Juli 2020 - Juli 2024);
3. Asisten Peneliti MaPPI FH UI (November 2018 - Juni 2020).

## **PENGALAMAN KERJA (PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN)**

### **1. Kejaksaan Agung:**

- a. Anggota di Kelompok Kerja Akses Keadilan [Keputusan Jaksa Agung Nomor 166 Tahun 2021 tentang Kelompok Kerja Akses Keadilan Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana diperpanjang beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Jaksa Agung Nomor 192 Tahun 2024] (Juli 2021 - sekarang), yang telah menyelesaikan:
  - i. PERJA 4/2024 tentang Kode Perilaku Jaksa dan Tata Cara Pemeriksaan atas Pelanggaran Kode Perilaku Jaksa;
  - ii. Pedoman 8/2022 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  - iii. Pedoman 7/2022 tentang Tuntutan dan Pelaksanaan Putusan Pidana Denda Perkara Tindak Pidana Umum;
  - iv. Pedoman 11/2021 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika dan/atau Tindak Pidana Prekursor Narkotika.
- b. Tim Percepatan Perancangan Peraturan Pemerintah tentang Manajemen Kepegawaian Jaksa [Anggota di Tim Percepatan; berdasarkan SK JA Nomor 193 Tahun 2024] (Agustus 2024 - sekarang);
- c. Tim Pendukung untuk Penyusunan RPJMN 2025-2029 dan RPJPN 2025-2045 [Anggota di Tim Pendukung; berdasarkan SK JA Nomor 191 Tahun 2024] (Agustus 2024 - sekarang);
- d. Anggota Tim Kejaksaan untuk Pembahasan UU 22/2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual [SPRIN JAMPIDUM Nomor PRIN-2646/E/Es.1/08/2021] (Agustus 2021 - April 2022).

### **2. Mahkamah Agung:**

- a. [Anggota di Kelompok Kerja Perempuan dan Anak; berdasarkan SK 237/KMA/SK.HK2/XI/2024] (November 2024 - sekarang)
- b. Drafter Rancangan PERMA tentang Pedoman Mengadili dan Pedoman Pemidanaan Tindak Pidana Narkotika [Anggota di Kelompok Kerja; berdasarkan SK 265/KMA/SK/VIII/2022] (Agustus 2022 - sekarang);
- c. Drafter PERMA 1/2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif [Anggota di Kelompok Kerja; berdasarkan SK 238/KMA/SK/XI/2021] (November 2021 - Januari 2024);
- d. Drafter Keputusan KMA Nomor 359/KMA/SK/XII/2022 tentang *Template* dan Pedoman Penulisan Putusan/Penetapan Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan di Bawah Mahkamah Agung [Tim Peneliti di Kelompok Kerja; berdasarkan SK 62/KMA/SK/III/2019] (Maret 2019 - Desember 2022);
- e. Drafter PERMA 2/2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Keberatan Pihak Ketiga yang Beritikad Baik Terhadap Putusan Perampasan Barang Bukan Kepunyaan

- Terdakwa dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi [Anggota di Kelompok Kerja; berdasarkan SK 85/KMA/SK/V/2021] (November 2021 - Maret 2022);
- f. Drafter PERMA 1/2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 UU PTPK [Anggota di Kelompok Kerja; berdasarkan SK 189/KMA/SK/IX/2018] (November 2018 - Januari 2020).
3. **Kementerian Hukum dan HAM:**
    - a. Drafter Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana dan Tindakan [Anggota di Panitia Antar Kementerian; berdasarkan SK PPE.1205.PP.01.01 TAHUN 2024] (Juni 2024 - sekarang);
    - b. Drafter Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Perubahan Pidana Penjara Seumur Hidup Menjadi Pidana Penjara 20 Tahun [Anggota di Panitia Antar Kementerian; berdasarkan SK PPE.1204.PP.01.01 TAHUN 2024] (Juni 2024 - sekarang);
    - c. Drafter Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara dan Kriteria Penetapan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat (Living Law) [Anggota di Panitia Antar Kementerian; berdasarkan SK PPE.1203.PP.01.01 TAHUN 2024] (Juni 2024 - sekarang);
    - d. Drafter Rancangan UU Narkotika dan Psikotropika (2021 - sekarang).
  4. **Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan:**
    - a. Drafter Rancangan UU Keadilan Restoratif.
  5. **Jaringan Masyarakat Sipil:**
    - a. Drafter Rancangan UU Hukum Acara Pidana versi Masyarakat Sipil [ICJR].
    - b. Drafter Rancangan UU Kesetaraan dan Anti-Diskriminasi versi Masyarakat Sipil [CRM].

## **PENELITIAN & PUBLIKASI**

1. **Buku:**
  - a. Disparitas Putusan Pengadilan dalam Perkara Tindak Pidana Pencabulan dan Tindak Pidana Perkosaan (AIPJ2: 2024) [<https://ijrs.or.id/publikasi-ijrs/penelitian-disparitas-putusan-pengadilan-dalam-perkara-tindak-pidana-pencabulan-dan-tindak-pidana-perkosaan/>];
  - b. Pembaruan Hukum Acara Pidana Pasca Berlakunya KUHP 2023 (TAF: 2024) [<https://ijrs.or.id/publikasi-ijrs/pembaruan-hukum-acara-pidana-pasca-berlakunya-kuhp-2023/>];
  - c. Asesmen Peraturan Internal Lembaga Penegak Hukum tentang Keadilan Restoratif terhadap KUHP 2023 (UNODC: 2024) [<https://ijrs.or.id/publikasi-ijrs/asesmen-peraturan-internal-lembaga-penegak-hukum-tentang-keadilan-restoratif-terhadap-undang-undang-nomor-1-tahun-2023-tentang-kitab-undang-undang-hukum-pidana/>];
  - d. Panduan Memahami Pidana Bersyarat dalam KUHP – Pedoman Bagi Penegak Hukum (ICJR, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan: 2022);
  - e. Faktor-Faktor Penentu Hukuman Mati di Indonesia: Sebuah Indikator (TIFA: 2022) [<https://lbhmasyarakat.org/laporan-penelitian-faktor-hukuman-mati/>];

- f. Peluang dan Tantangan Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia (ICJR: 2022) [<https://icjr.or.id/peluang-dan-tantangan-penerapan-restorative-justice-dalam-sistem-peradilan-pidana-di-indonesia/>];
  - g. Penelitian Disparitas dan Kebijakan Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika di Indonesia (OSF: 2022) [<https://ijrs.or.id/publikasi-ijrs/penelitian-disparitas-dan-kebijakan-penanganan-perkara-tindak-pidana-narkotika-di-indonesia/>];
  - h. AUDIT KUHAP: Studi Evaluasi terhadap Keberlakuan Hukum Acara Pidana Indonesia (ICJR: 2022) [<https://icjr.or.id/audit-kuhap-studi-evaluasi-terhadap-keberlakuan-hukum-acara-pidana-indonesia/>];
  - i. Kerangka Kelembagaan dalam Proses Penegakan Hukum dan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia (Kementerian PPN/Bappenas: 2022) [<https://ijrs.or.id/publikasi-ijrs/kerangka-kelembagaan-dalam-proses-penegakan-hukum-dan-sistem-peradilan-pidana-di-indonesia/>];
  - j. Buku Saku Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (USAID: 2021) [<https://mappifhui.org/buku-saku-perma-1-tahun-2022-tentang-pedoman-pemidanaan-pasal-2-dan-pasal-3-undang-undang-pemberantasan-tindak-pidana-korupsi>].
2. **Media:**
- a. Kasus Mario Dandy: Salah kaprah penerapan keadilan restoratif – pemulihan korban tidak boleh menghentikan proses pidana pelaku. (The Conversation Indonesia: 2023) [<https://theconversation.com/kasus-mario-dandy-salah-kaprah-penerapan-keadilan-restoratif-pemulihan-korban-tidak-boleh-menghentikan-proses-pidana-pelaku-202614>].

## **PENGALAMAN LAINNYA**

1. Dosen Tamu Mata Kuliah Hukum Pidana di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Adhyaksa (6 Mei 2024 - sekarang).
2. Peserta dalam High-Level Forum on Multi-Stakeholder Partnerships yang diselenggarakan oleh Kementerian PPN/Bappenas (1 September 2024 - 3 September 2024).
3. Menjadi Narasumber Diseminasi Riset Pembaruan Hukum Acara Pidana Pasca Berlakunya KUHP 2023 (2024).
4. Peserta dalam Judicial Symposium on Terrorism Eradication yang diselenggarakan oleh Jakarta Centre For Law Enforcement Cooperation (JCLEC) UK Government, (16 Januari 2024 - 17 Januari 2024).
5. Fellowship pada South-East Asia Advocacy Program on Drug Policy yang diselenggarakan oleh RELEASE di London (England) dan Cardiff (Wales), United Kingdom (23 September 2023 - 9 Oktober 2023).

6. Menjadi Narasumber Peluncuran Pedoman Kejaksaan No. 8 Tahun 2022 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Di Bidang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (2022).
7. Menjadi Narasumber Diseminasi Hasil Penelitian Disparitas dan Kebijakan Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika di Indonesia (2022).
8. Menjadi Narasumber Sosialisasi Pedoman Nomor 7 Tahun 2022 tentang Tuntutan dan Pelaksanaan Putusan Pidana Denda Perkara Tindak Pidana Umum (2022).
9. Menjadi Narasumber Diskusi Publik bertajuk “Kajian Kritis PEDOMAN Penuntutan 11/2021 tentang Penanganan Perkara Narkotika” (2021).
10. Menjadi Pemapar dalam Webinar Sosialisasi Publik PERMA Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan pasal 2 dan 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (2020).
11. Juara 3 National Moot Court Competition (NMCC) Tjokorda Raka Dherana V, Fakultas Hukum Universitas Udayana (2018).
12. Peraih Penghargaan The Best Drummer, Universitas Indonesia Art War (2016).
13. Peraih Penghargaan The Best Drummer, Universitas Indonesia Art War (2015).